

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna, menyampaikan ideologi, serta memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu realitas. Dalam ranah politik, bahasa menjadi instrumen yang digunakan oleh aktor politik untuk membentuk opini publik, memperoleh legitimasi, dan mengonstruksi narasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi.

Dalam konteks politik di Indonesia, pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Oktober 2024 menghadapi berbagai dinamika sosial politik yang menghadirkan resistensi dari masyarakat. Salah satu aksi demonstrasi yang terjadi adalah rentetan aksi demonstrasi pada tanggal 25-31 Agustus 2025. Demonstrasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, buruh, mahasiswa, dan pelajar.

Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan mengenai tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipandang terlalu berlebihan serta tidak sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah juga turut menjadi latar belakang terjadinya demonstrasi ini. Unjuk rasa tidak hanya terpusat di ibu kota, tetapi juga menjalar ke berbagai gedung DPRD di sejumlah daerah. Meluasnya

demonstrasi tersebut mencerminkan bahwa persoalan yang diperdebatkan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga legislatif untuk membahas gelombang demonstrasi yang berlangsung selama sepekan terakhir. Konferensi pers tersebut diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada 31 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi oleh pimpinan lembaga legislatif, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain itu, hadir pula sejumlah pimpinan partai politik, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga merupakan praktik diskursif yang berpotensi membentuk cara masyarakat memahami demonstrasi dan partisipan yang terlibat di dalamnya. Melalui pilihan unsur kebahasaan serta strategi argumentasi yang digunakan, pemerintah dapat membangun representasi tertentu terhadap demonstrasi, memperkuat legitimasi kebijakan, sekaligus membentuk relasi antara negara dan

masyarakat. Dengan demikian, pernyataan Presiden tidak dapat dipandang sebagai rangkaian tuturan yang bersifat netral, melainkan sebagai wacana yang mengandung kepentingan, ideologi, dan relasi kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, Analisis Wacana Kritis (AWK) menjadi pendekatan yang relevan untuk mengungkap makna, ideologi, dan relasi kekuasaan yang terkandung di balik penggunaan bahasa. Salah satu model Analisis Wacana Kritis yang banyak digunakan adalah model Norman Fairclough. Fairclough memandang bahasa sebagai praktik sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough, analisis dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu teks (*text*), praktik diskursif (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana suatu wacana diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, serta dipengaruhi oleh struktur sosial yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini menawarkan keterbaharuan melalui objek kajian yang kontekstual dan aktual, yaitu pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025. Keunikan penelitian ini terletak pada konteks institusionalnya karena melibatkan Presiden RI, pimpinan lembaga legislatif, dan pimpinan partai politik. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough pada wacana respons pemerintah terhadap gelombang demonstrasi Agustus 2025 di Indonesia, khususnya dalam mengungkap keterkaitan antara dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural dalam membentuk makna serta ideologi di balik pernyataan Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana analisis teks (mikrostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025?
- b. Bagaimana analisis praktik wacana (mesostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025?
- c. Bagaimana analisis praktik sosiokultural (makrostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis teks (mikrostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik wacana kritis (mesostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025.

- c. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik sosiokultural (makrostruktural) wacana kritis Norman Fairclough terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025.

1.4 Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini terarah dan tidak mengalami kerancuan dalam proses analisis maupun penafsiran hasil, maka diperlukan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi pada objek kajian berupa pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025 yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2025. Analisis dilakukan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu linguistik bidang Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam konteks politik Indonesia khususnya terkait analisis wacana pernyataan presiden.

- b. Memperkaya Khazanah kajian mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis dalam memahami wacana politik yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat lebih mampu menafsirkan pesan politik secara objektif dan rasional.

b. Bagi Pemerintah dan Pejabat Publik

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan strategi komunikasi politik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian analisis wacana kritis terutama yang berfokus pada relasi antara bahasa dan kekuasaan.

1.6 Keaslian Penelitian (*State of The Art*)

Penelitian mengenai analisis wacana kritis dalam ranah komunikasi politik telah banyak dilakukan, khususnya terhadap pidato politik, debat politik, kampanye pemilu, maupun pernyataan pejabat publik dalam isu

tertentu. Tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk menentukan posisi penelitian ini dalam peta kajian ilmiah. Langkah tersebut bertujuan memastikan keaslian karya, menghindari pengulangan topik yang sama, serta menegaskan unsur kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan peneliti. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan tema, namun tetap menunjukkan perbedaan pada fokus dan ruang lingkup kajian.

Penelitian pertama yang menjadi acuan adalah karya Hersila Astari Pitaloka (2024) yang berjudul “Strategi Tutur Pejabat Negara dalam Wawancara Youtube Perspektif Analisis Wacana Kritis”. Penelitian Hersila Astari Pitaloka memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough serta fokus kajian pada relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam wacana politik pejabat publik. Perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Pitaloka menganalisis strategi tutur pejabat negara dalam wawancara yang disiarkan melalui YouTube, sedangkan penelitian ini berfokus pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi tahun 2025 yang disampaikan melalui konferensi pers sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Penelitian kedua adalah karya Tri Indrayanti, Ani Rakhmawati, dan Kundharu Saddhono (2025) yang berjudul “Mengungkap Kekuatan Retorikan dalam Pidato Presiden Prabowo Subianto “Singgung Tarif Trump” (Analisis wacana kritis Fairclough). Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai objek material

penelitian serta menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Perbedaannya, penelitian Indrayanti dkk. menganalisis satu pidato Presiden yang berfokus pada isu ekonomi internasional, sedangkan penelitian ini mengkaji pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam konteks demonstrasi Agustus 2025 yang berkaitan dengan isu sosial, politik dan stabilitas nasional.

Penelitian ketiga adalah karya Hajrah, Anisa Maulidiah Alam, dan Jufri (2022) dengan judul “Analisis Wacana Kritis pada Pidato Presiden Tahun 2022: Model Norman Fairclough”. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan analisis tiga dimensi Fairclough, yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Perbedaannya terletak pada subjek dan konteks penelitian. Hajrah dkk. mengkaji pidato Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, sedangkan penelitian ini mengkaji pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons demonstrasi Agustus 2025 sebagai bagian dari komunikasi politik pemerintah.

Penelitian keempat adalah karya Lutfi Abdul Majid Amin, Nimas Permata Putri, dan Eny Setyowati (2025) yang berjudul Kondisi Sosial dan Politik dalam Wacana Debat ke-4 Calon Wakil Presiden Indonesia Pemilu 2024. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengkaji relasi antara bahasa dan kondisi sosial politik. Namun, penelitian Amin dkk. hanya memanfaatkan dimensi praktik sosiokultural dalam analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan ketiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough,

yaitu dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Penelitian kelima adalah karya Yosua Asa Firdaus (2025) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Dedi Mulyadi tentang Penghapusan Wisuda Sekolah: Perspektif Norman Fairclough”. Penelitian ini memiliki kesamaan karena sama-sama menganalisis pernyataan tokoh publik yang menimbulkan perdebatan di masyarakat dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Perbedaannya terletak pada objek dan isu yang dikaji. Firdaus berfokus pada isu pendidikan melalui pernyataan Dedi Mulyadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025.

Berdasarkan tinjauan terhadap lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dalam kajian Analisis Wacana Kritis. Keaslian penelitian ini terletak pada pemilihan objek kajian yang aktual, yaitu pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi demonstrasi Agustus 2025. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji respons resmi presiden terhadap gelombang demonstrasi nasional dengan menggunakan tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun relasi kekuasaan dan ideologi dalam komunikasi politik pemerintah ketika merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.